

# Demokratisasi dan Tingkat Korupsi



VISHNU JUWONO

Dosen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia

disinya menunjukkan tren kemajuan atau sebaliknya, justru mengalami kemunduran?

## Negara-Negara Perbandingan

Pada saat tahap awal dari proses transisi menuju demokrasi, banyak pengamat baik dalam maupun luar negeri mengomentari kondisi di Tanah Air. Pengamat luar negeri bahkan ada yang sudah memvonis Indonesia sebagai negara gagal.

Kolumnis *New York Times*, Thomas Friedman, bahkan mengatakan Indonesia adalah "messy state" pada 2002. Untuk

mengukur kemajuan dari proses demokratisasi dan tingkat korupsi Indonesia, tentu saja harus dibandingkan dengan negara-negara berkembang yang mempunyai karakteristik politik, sosial, dan ekonomi yang sama.

Seringkali para pengamat atau organisasi nonpemerintah (NGO) nasional dan internasional membandingkan Indonesia dengan negara tetangga seperti Thailand, Malaya, Singapura. Tentu saja ini perbandingan yang tidak sesuai, mengingat Indonesia berdasarkan statistik Bank Dunia pada 2014 masuk dalam kategori negara berkembang, dengan pendapatan kotor nasional sebesar USD1.046-USD4.125 (dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa).

Sedangkan Thailand dan Ma-

laysia termasuk dalam kategori negara berkembang dengan pendapatan tinggi. Jumlah penduduk masing-masing negara hanya 67,7 juta jiwa (Thailand) dan 29,9 juta jiwa (Malaysia). Terus saja Singapura yang masuk dalam kategori negara maju dengan pendapatan bruto nasional yang amat tinggi yakni USD55.000 per kapita dengan penduduk hanya 5,47 juta jiwa

seandainya dibandingkan dengan Indonesia.

Menurut pendapat penulis, sebenarnya dua dekade transisi demokrasi pasca-Pr

siden RI Ke-2 Soeharto, Indonesia lebih layak untuk dibandingkan dengan negara ber-

kembang yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang tidak jauh berbeda. Dua karakteristik tersebut adalah negara berkembang dengan pendapatan kotor nasional dalam kategori rendah-se

panjang dengan Indonesia—dan dengan jumlah penduduk yang lebih dari 80 juta penduduk.

Negara-negara yang masuk dalam kategori ini adalah India (1,2 miliar jiwa), Filipina (100,1 juta jiwa), Vietnam (90,73 juta jiwa), dan Mesir (83,4 juta jiwa).

Dalam membandingkan empat negara berkembang ter-

sebut dengan Indonesia, penulis menggunakan beberapa indikator internasional terkait demokratisasi dan tingkat korupsi suatu negara. Indikator tersebut adalah *Corruption Perceptions Index* (CPI) yang diterbitkan *Transparency International* (TI) dan *Freedom Index* oleh *Freedom House*.

digunakan oleh berbagai pe-

ngamat politik maupun ekonomi internasional dalam analisisnya. Pertama untuk mem-

bandingkan pertama antar negara dalam konteks rata kelola, demokrasi dan tingkat korupsi (Sachs dan Warner A, 1995; Rodrik, Subramanian, dan Trebbi, 2004; Fukuyama, 2004; Diamond, 2009).

Dengan demikian, terlepas dari berbagai kelemahan, di dalam tulisan ini penulis dengan menggunakan indikator internasional tersebut mencoba me-

ngukur kemajuan Indonesia dibandingkan dengan Vietnam dalam konteks demokrasi dan tingkat korupsi.

Apabila kita melihat tingkat persepsi korupsi (CPI) yang diterbitkan TI, Indonesia menunjukkan tren yang positif sejak beberapa tahun terakhir kepe-

mimpinan Soeharto pada 1995 dengan indeks CPI 1,94. Sedangkan masa kepemimpinan presiden Jokowi pada 2015

mandapatkan skor CPI 3,6 (thbagi 10 karena sejak 2012 digunakan skala 0-100).

Hingga 2015 hanya India yang unggul dari Indonesia dengan nilai CPI sebesar 3,8. Mesir

memiliki nilai sama yakni 3,6. Sedangkan Filipina dan Vietnam tertinggi dari Indonesia dengan masing-masing skor CPI 3,1 dan 3,1.

Sedangkan dalam *Freedom Index*, di mana negara dengan sistem politik bebas mempunyai skor semak kecil, Indonesia menunjukkan perbaikan. In-

donesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dimana pada 1995 Indonesia masuk dalam kategori negara tertinggal dengan nilai 6,5. Indeks Indonesia bahkan sempat meningkat sebagai negara bebas dengan nilai 2,5 pada 2013, sebelum kembali lagi dalam kategori negara yang sebagian bebas pada 2014 dan 2015 dengan nilai 3,5.

Sementara itu, India dan Filipina yang mempunyai tradisi demokrasi yang lebih panjang (selama 20 tahun terakhir) stabil dengan nilai antara 2,5-3,5, yang membuat mereka dalam kategori sebagian bebas atau bebas. Sedangkan Vietnam dan Mesir selamanya cukup jauh tertinggal karena mekayasa bid-

ngan sistem politik tertutup yang didominasi oleh peran militer. Oleh *Freedom House*, dua negara ini dinilai 6-7 dalam kategori negara tertutup.

Indonesia

Negara Gagah?

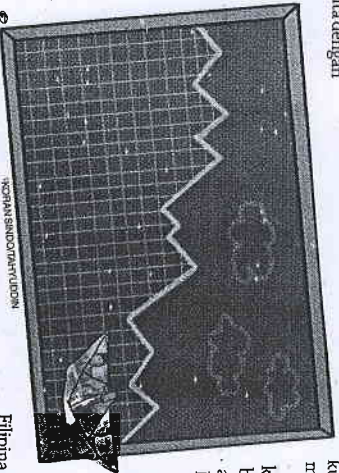
Apabila dilihat dari tren nilai rata kelola dan tingkat korupsi seperti yang dikemukakan di

atas, Indonesia dibandingkan dengan empat negara tersebut menunjukkan tren positif sejak 1995. Dalam hal tingkat korupsi Indonesia hanya lebih rendah dibandingkan dengan Mesir pada 2015.

Tetapi, dalam demokratisasi Indonesia selalu unggul dibandingkan dengan Mesir dan Vietnam. Sedangkan India dan Filipina yang mempunyai tradisi demokrasi mendahului Indonesia lebih dari satu dekade, tentu saja dalam posisi yang lebih stabil.

Tren positif ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak termasuk dalam kategori negara gagal" mengingat beberapa negara yang mengalami transisi dari pemerintahan yang didominasi militer menuju demokratisasi—seperti di Thailand dan Mesir—menghadapi kemunduran. Tantangan berikutnya adalah bagaimana mewujudkan Indonesia menjadi negara berkembang dengan pendapatan tinggi, setara dengan Tiongkok atau Thailand.

Dua negara tersebut memiliki pendapatan kotor nasional per kapita antara USD4.126-USD12.735 serta nilai tingkat persepsi korupsi setidaknya lebih dari nilai 50. Tantangan itu hanya bisa dijawab oleh Presiden Jokowi, sesuai dengan mottoya yakni dengan "kerja, dan kerja".



SOURCE: SIMONOV/VIADOM

Tidak dimungkiri banyak kritik terkait dengan penggunaan indikator tersebut, dimana dari rentan terhadap subjektivitas dari responden yang merupakan para ahli atau pelaku bisnis (Benson, 2003). Bahwa ada pula yang mengkritisi dari segi metode statistik dalam hal memproses data dan kategori variabel datanya (Wahman dan Siddique, 2008; Newman dan Graeff, 2010).

Namun, terlepas dari berbagai kelemahannya, indikator-indikator tersebut terbukti